



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

RISIKO PENINGKATAN VOLUME IMPOR MIGAS DARI AMERIKA SERIKAT

T. Ade Surya

Analisis Legislatif Ahli Madya
teuku.surya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah berencana meningkatkan volume impor minyak mentah dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari strategi negosiasi penurunan tarif resiprosal AS terhadap Indonesia. Peningkatan volume impor migas dari AS ini tidak menambah total volume impor migas nasional, melainkan pengalihan (*shifting*) sumber pasokan dari negara lain ke AS. Saat ini, volume impor migas dari AS masih tergolong kecil, hanya sekitar 4 persen untuk minyak mentah dan sekitar 57 persen untuk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dari total volume impor migas Indonesia, dengan nilai transaksi hingga USD2–3 miliar per tahun. Namun, rencana peningkatan volume impor migas dari AS ini menghadirkan sejumlah risiko yang perlu dicermati secara serius.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa risiko utama peningkatan volume impor migas dari AS adalah terkait jarak pengiriman yang cukup jauh. Kapal dari AS memerlukan waktu sekitar 40 hari untuk sampai ke Indonesia, jauh lebih lama dibandingkan pengiriman dari negara-negara Timur Tengah maupun Asia lainnya, yang umumnya hanya memerlukan waktu pengiriman sekitar 10–20 hari. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah dalam hal ketersediaan stok. Selain itu, risiko gangguan akibat cuaca dan operasional juga perlu diperhatikan. Rute pelayaran dari AS menuju Indonesia melewati wilayah yang rawan badai dan kabut tebal, yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman. Gangguan seperti ini berpotensi mengganggu pasokan migas nasional dan memicu fluktuasi harga di pasar domestik.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kesiapan infrastruktur dalam negeri untuk mengelola peningkatan volume impor migas dari AS. Fasilitas pelabuhan, tempat penyimpanan, dan sistem distribusi harus mampu menangani karakteristik logistik yang berbeda akibat jarak pengiriman yang lebih jauh. Jika infrastruktur belum memadai, potensi terjadinya *bottleneck* dalam rantai pasok sangat besar dan dapat mengganggu kelancaran distribusi migas ke konsumen akhir. Selain itu, dari sisi ekonomi, biaya impor migas dari AS diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dari sumber pasokan lain karena biaya transportasi dan kebutuhan stok yang meningkat.

Meski begitu, pemerintah tetap optimistis bahwa risiko maupun tantangan tersebut dapat diatasi dan tidak menjadi alasan untuk menolak rencana peningkatan volume impor migas dari AS. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia sudah berpengalaman dalam mengimpor LPG dari AS, yang porsinya saat ini sudah lebih dari 50 persen dari total impor LPG nasional sehingga tantangan logistik dan waktu pengiriman bukan hal baru. Peningkatan volume impor migas dari AS juga dipandang sebagai langkah strategis dalam diplomasi ekonomi.

Namun demikian, berbagai potensi risiko yang telah diidentifikasi tidak dapat diabaikan begitu saja sehingga diperlukan upaya mitigasi risiko agar setiap risiko yang muncul dapat diatasi atau

diminimalisir. Terlebih, volume impor yang ditingkatkan termasuk minyak mentah yang penggunaannya lebih luas dan memiliki karakteristik berbeda dengan LPG. Terkait hal ini, PT Pertamina (Persero) sedang mengkaji secara komprehensif aspek teknis, komersial, dan operasional untuk memastikan rencana peningkatan volume impor dari AS dapat dilakukan secara efektif tanpa mengganggu stabilitas pasokan energi nasional. PT Pertamina (Persero) juga mengharapkan dukungan kebijakan dalam bentuk payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kerja sama suplai energi. Kajian risiko yang menyeluruh, dukungan kebijakan, serta penguatan infrastruktur menjadi hal penting agar rencana peningkatan volume impor dari AS dapat terlaksana dengan baik dan tetap dapat menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Atensi DPR

Rencana peningkatan volume impor migas dari AS dengan mengalihkan impor sumber pasokan migas dari negara lain menghadirkan sejumlah risiko yang perlu dicermati. Risiko terkait jarak, waktu pengiriman, dan gangguan cuaca yang berpotensi menimbulkan masalah ketersediaan stok, gangguan pasokan migas, dan fluktuasi harga di pasar domestik perlu diantisipasi. Walaupun selama ini Indonesia telah mengimpor migas dari AS, potensi risiko yang muncul tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama karena volume impor yang ditingkatkan termasuk minyak mentah yang penggunaannya lebih luas. Komisi XII DPR RI perlu memberikan atensi terhadap rencana peningkatan volume impor migas dari AS ini, dengan meminta Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang terencana dan terintegrasi sehingga stabilitas pasokan dan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Komisi XII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk tetap berupaya meningkatkan produksi migas dalam negeri dan melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor migas.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 22 dan 23 Mei 2025;
finance.detik.com, 22 Mei 2025; dan
industri.kontan.co.id, 23 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*